



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id; Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 012 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran dan akuntabilitas kinerja program, diperlukan indikator kinerja program yang terdefinisi secara jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk:

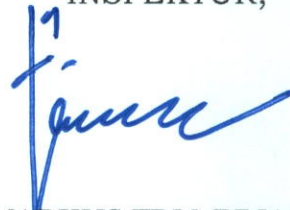
- a. perencanaan tahunan;
- b. perencanaan menengah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Nomor 09/KPTS/2022 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Inspektorat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wabesari
pada tanggal 6 Januari 2026

INSPEKTUR,



X MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
 NOMOR 012 TAHUN 2026
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
 DAERAH

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Nama Perangkat Daerah	:	INSPEKTORAT DAERAH
2. Tugas	:	Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah.
3. Fungsi	:	1. perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 3. perumusan perencanaan program pengawasan; 4. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 5. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 6. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah; 7. penyusunan laporan hasil pengawasan; 8. pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah; 9. pengusutan kebenaran laporan dan/ atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan; 10. penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan; 11. pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; 12. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 13. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

		14. pengorganisasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Inspektorat; 15. penyelenggaraan system pengendalian intern dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 16. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan 18. pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.
4.Indikator Kinerja Program	:	

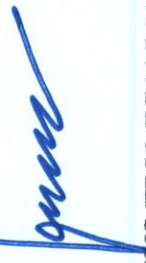
TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan							
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Sekretariat	

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.)			
	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana entitas pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterbitkan pada tahun anggaran sebelumnya (tahun N-1)	$\text{Persentase TL} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai Total rekomendasi BPK tahun anggaran -1}}{100\%}$	Sekertariat	1. Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh BPK 2. SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) BPK RI
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu: a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi Interval Skor IEPK	Penjelasan karakteristik tingkatan IEPK sebagai berikut: 1. Tingkat Rintisan menunjukkan bahwa organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian tujuan dan pengendaliannya yang berdampak kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi; 2. Tingkat Berkembang menunjukkan bahwa organisasi telah mampi mendefinisikan kinerjanya dengan baik,		Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				No Tingkat Maturitas Interval Skor 1. Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 4. Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum ≥ 4,50	namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan yang berdampak risiko terjadinya korupsi yang tinggi; 3. Tingkat Terdefinisi Menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif yang berdampak cukup tingginya risiko keterjadian korupsi; 4. Tingkat Terkelola dan Terukur menunjukkan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi; 5. Tingkat Optimum menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik		

TUJUAN/SASARAN	PROGRAM	OUTCOME PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/INTERPRETASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan		

INSPEKTUR,



MARKUS TRI MUNARJA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

NO	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
								Target	RP		Target	RP		Target	RP		Target	RP		
								8	9		10	11		12	13		14	15		
1	Terwujudnya sistim penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	3	4	5	6	7														16
1		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			2.523.223.430			2.450.987.031			1.771.160.955		3,16	1.323.003.203		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,14	83,14	2.330.251.930	83,14		2.021.704.331		83,14	1.420.811.155		83,14	1.082.712.303		
			6.01.01.2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.098.700			7.166.875			8.387.425			7.557.400		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang akurat dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	2 Dokumen	7.225.400	0 Dokumen		6.844.500		2 Dokumen	7.225.400		0 Dokumen	6.844.500		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen RKA-SKPD Secara efektif, efisien dan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0		1 dokumen	324.000		0 Dokumen	0		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penyusunan perubahan dokumen RKA Secara efektif, efisien dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0		0 Dokumen	0		1 dokumen	324.000		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen DPA Secara efektif, efisien dan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 dokumen	540.300	0 dokumen		0		0 dokumen	0		0 dokumen	0		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya penyusunan perubahan dokumen DPA Secara efektif, efisien dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0		2 Dokumen	447.900		dokumen	0		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja secara akurat & tepat waktu	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	12 Laporan	333.000	3 Laporan		49.500		2 Laporan	49.500		0 Laporan	47.900		Kassubag Perencanaan
			6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara akurat dan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	0 Laporan	-	2 Laporan		272.875		1 Laporan	340.625		2 Laporan	341.000		Kassubag Perencanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi keuangan secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu		1.591.581.130		1.275.974.956		943.862.130		628.594.003	Kasubag Perencanaan
			6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	260 Orang	1.590.640.530	208 Orang	1.275.487.456	156 Orang	943.374.630	104 Orang	628.106.503	Kasubag Perencanaan
			6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	453.100	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	Kasubag Perencanaan
			6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	487.500	3 Laporan	487.500	3 Laporan	487.500	3 Laporan	487.500	Kasubag Perencanaan
			6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi Kepegawaian secara tertib dan tepat waktu	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		86.855.000		88.655.000		140.155.000		117.202.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian secara tertib dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Laporan	2.505.000	2 Laporan	1.755.000	1 Laporan	2.505.000	1 Laporan	1.752.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sesuai peta kompetensi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	84.350.000	22 Orang	86.900.000	7 Orang	137.650.000	12 Orang	115.450.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi umum secara tertib dan tepat waktu	Jumlah layanan administrasi umum terlayani		113.598.600		123.417.500		180.898.500		179.906.300	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Instalasi Listrik secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.940.600	1 Paket	2.541.000	1 Paket	2.537.000	1 Paket	1.985.800	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.969.500	1 Paket	24.952.500	1 Paket	24.897.500	1 Paket	23.667.500	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	23.591.500	1 Paket	23.501.000	1 Paket	70.006.000	1 Paket	73.954.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan secara efektif dan efisien	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.077.000	1 Paket	5.953.000	1 Paket	5.488.000	1 Paket	5.002.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan secara Efektif dan Efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen	270.000	64 Dokumen	270.000	66 Dokumen	270.000	66 Dokumen	270.000	
			6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan Fasilitasi Tamu secara memadai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.300.000	1 Laporan	1.125.000	1 Laporan	1.200.000	1 Laporan	1.800.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi secara efektif dan efisien	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	50.450.000	15 Orang	65.075.000	12 Orang	76.500.000	14 Orang	73.227.000	Kasubag Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana efektif dan efisien	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan terlaksana	48 Unit	376.416.000	0 Unit	72.500.000	0 Unit		0 Unit		
			6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Paket Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Disiapkan Secara Efektif dan efisien	Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dan efisien	51 Unit	376.416.000	1 Unit	72.500.000					
			6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang Urusan secara efektif dan efisien	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		37.590.000		37.590.000		37.550.000		37.413.500	Kasubag Umum
			6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat secara akurat dan tepat waktu	Jumlah Laporan Menyurat	3 Laporan	1.620.000	3 Laporan	1.620.000	3 Laporan	1.580.000	3 Laporan	1.500.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara akurat dan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	9 Laporan	35.970.000	9 Laporan	35.970.000	9 Laporan	35.970.000	9 Laporan	35.913.500	Kasubag Umum
			6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan secara efektif dan efisien	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		116.112.500		416.400.000		109.958.100		112.039.100	Kasubag Umum
			6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor secara efektif dan efisien	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	62.740.000	52 Unit	62.740.000	53 Unit	62.740.000	53 Unit	61.780.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara efektif dan efisien	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5.400.000	15 Unit	10.800.000	15 Unit	5.400.000	15 Unit	9.900.000	Kasubag Umum
			6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya secara efektif dan efisien	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.312.500	-	338.400.000	-	38.158.100	-	36.699.100	Kasubag Umum
			6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya secara efektif dan efisien	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	7.660.000	17 Unit	4.460.000	15 Unit	3.660.000	11 Unit	3.660.000	Kasubag Umum
								80.294.500		226.907.800		200.940.900	3.88	112.149.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyeleweengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		80.294.500	100%	226.907.800	100%	200.940.900	100%	112.149.500	
			6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penjaminan kualitas melalui proses audit	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah		49.150.000		189.500.800		19.250.800		79.752.000	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Audit dan Evaluasi kinerja atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Laporan	5.132.500	40 Laporan	102.085.800	3 Laporan	5.210.800	6 laporan	8.714.100	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	4.180.000	4 Laporan	2.045.000	4 Laporan	-	5 Laporan	-	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu perencanaan dan penganggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	144 Laporan	13.197.500	36 Laporan	16.210.000	33 Laporan	9.075.000	39 Laporan	20.235.000	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	125 Laporan	10.250.000	48 Laporan	2.750.000	20 Laporan	2.750.000	10 Laporan	17.807.000	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18 Laporan	14.625.000	4 Laporan	1.250.000	7 Laporan	-	2 Laporan	27.282.400	
			6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 kespakatan	1.765.000	0 Kesepakatan	2.205.000	1 Kesepakatan	2.215.000	0 Kesepakatan	2.704.500	
			6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penyeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/Ip	Terlaksananya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/Ip	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP/Ip	6 Dokumen	-	2 Dokumen	62.955.000	1 dokumen	-	2 Dokumen	3.009.000	
			6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penjaminan kualitas melalui proses audit	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti		31.144.500		37.407.000		181.690.100		32.397.500	Kassubag Evalap
			6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Terlaksananya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	11 Laporan	20.082.000	3 Laporan	14.832.000	3 Laporan	12.164.600	3 Laporan	8.410.000	
			6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	11.062.500	49 Laporan	22.575.000	1 Laporan	169.525.500	2 Laporan	23.987.500	Kassubag Evalap
			6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		112.677.000	3,02	202.374.900	3,02	149.408.900	3,02	128.141.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Tersusunnya Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan terlaksana		1.703.500		1.703.500		1.703.500		1.694.500	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya perumusan kebijakan dibidang pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3	950.000	1 Rekomendasi	950.000	1 Rekomendasi	950.000	0 Rekomendasi	927.500	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya penyusunan nota dinas dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	6	753.500	2 Rekomendasi	753.500	2 Rekomendasi	753.500	0 Rekomendasi	767.000	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Pemberian Layanan konsultasi atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana		110.973.500		200.671.400		147.705.400		126.446.900	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Asistensi Atas penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 PD	7.850.000	31 Perangkat Daerah	7.975.000	59 Perangkat Daerah	7.100.000	21 Perangkat Daerah	7.205.000	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya consulting activities melalui proses asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	191 PD	8.428.500	150 Perangkat Daerah	76.986.500	19 Perangkat Daerah	5.780.500	2 Perangkat Daerah	5.665.500	Kasubag Evalap
			6.01.03.2.02.03	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	90.882.500	3 Kegiatan	109.772.400	0 Kegiatan	123.913.400	0 Kegiatan	82.858.400	
			6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi kasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi kasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi kasi Penegakan Integritas	47 PD	3.812.500	18 Perangkat Daerah	5.937.500	12 Perangkat Daerah	10.911.500	13 Perangkat Daerah	30.718.000	
					Jumlah			2.523.223.430		2.450.987.031		1.771.160.955		1.323.003.203	8.068.374.619

Wonsari,
INSPEKTUR,

MARKUS TRI MUNARJA, SIP. M Si
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 197012061996031003